



Kamis, 06 Sept
2007

Jakarta Raya

Metropolis

Olahraga

Ekonomi Bisnis

Show & Selebriti

Halaman Utama



Kamis, 06 Sept 2007,

Bukan Sekadar Aturan Berkendara



RUBRIK

Berita Utama
Internasional
Opini
Visite
Politika
Edisi Mingguan

RUBRIK LAIN

Pro Otonomi
Riset & Polling
Laporan Khusus
Edukasi
Ulasan Ekonomi
Kajian
Sosok
Kolom Halte
Nouvelle

DETEKSI

Deteksi Surabaya
Deteksi Jakarta
Movies
Otomotif
De-Style
Aidoru
Aime
Cerpen
Muzik
Techno
Toys & Hobby
Game Anime

Pemkot Geber Program KTL

ISTILAH kawasan tertib lalu lintas (KTL) sebenarnya bukan barang baru. Dulu, masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya, mengenal istilah tersebut sebagai program tertib berkendara. Misalnya, tentang kewajiban memakai helm dan kanalisasi di jalur tertentu.

Kini, program KTL kembali digeber Pemkot Surabaya. Modelnya tentu jauh berbeda dari KTL zaman dulu. "Kalau dulu, program KTL lebih berorientasi pada penegakan disiplin berlalu lintas di jalur-jalur yang telah ditetapkan. Sekarang jauh lebih komplet. KTL juga mencakup kelengkapan fasilitas lalu lintas serta penataan kawasan yang lebih menyeluruh," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya Bambang Suprihadi.

Dia menjelaskan, Surabaya memang pernah memiliki program KTL yang dituangkan melalui SK Wali Kota Nomor 46/1997 tertanggal 30 Juni. Dalam SK tersebut, pemkot menetapkan 21 jalan di wilayah kota ini untuk menjadi KTL. Ke-21 jalur itu adalah Jl Diponegoro, Ciliwung, Adityawarman, Kutai, Mayjen Sungkono, Bengawan, dr Soetomo, Ahmad Yani, Wonokromo, Raya Darmo, Urip Sumoharjo, Basuki Rahmat, Embong Malang, dan Praban. Selain itu, Jalan Bubutan, Gemblongan, Tunjungan, Pemuda, Panglima Sudirman, Raya Gubeng, dan Pahlawan.

Pada awal penerapan kala itu, pemkot menetapkan tujuh jalur sebagai pilot project program tersebut. Di antaranya, Jl Raya Darmo, Urip Sumoharjo, Basuki Rahmat, Embong Malang, Tunjungan, Pemuda, dan Gubernur Suryo. Ternyata, setelah ketetapan itu diberlakukan selama 10 tahun, ternyata tidak ada perkembangan signifikan. Hingga akhir 2006, sama sekali tidak ada penambahan KTL.

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan mendeknya proyek-proyek besar penambahan kapasitas jalan, pemkot kembali melirik program KTL untuk mengurai kemacetan di Surabaya. Sejak awal 2007 hingga sekarang, mereka telah mengembangkan kawasan tertib lalu lintas dari tujuh menjadi 17 jalur. Sepuluh KTL baru itu adalah Jl Bubutan, Panglima Sudirman, Kutai, dr Soetomo, Adityawarman, Mayjen Sungkono, Kartini, Babatan, Gemblongan, dan Bengawan.

"Konsep itulah yang terbilang paling memungkinkan dilakukan untuk menata kondisi lalu lintas di Surabaya ini yang makin semrawut," tegas Bambang.

Dia menjelaskan, pada intinya, KTL merupakan kawasan jalan yang

Redaksi Jawa Pos

Graha Pena Lt. 4
Jl. A. Yani 88 Surabaya
Telp. :+62-31-8202216
Fax. :+62-31-8285555
editor@jawapos.co.id /

editor@jawapos.com

ditata sedemikian rupa agar kondisi lalu lintas benar-benar tertib, teratur, serta lancar. Selain mendorong tertib berlalu lintas kepada para pengguna jalan, KTL harus bersih dari segala kesemrawutan yang meruwetkan jalan. Misalnya, steril dari parkir tepi jalan, becak, dan pedagang kaki lima (PKL).

Selain itu, kata dia, KTL harus memiliki berbagai fasilitas penunjang kelancaran lalu lintas. Misalnya, rambu-rambu yang komplet, markah jalan yang terawat, sarana untuk pejalan kaki yang layak, jembatan penyeberangan orang (JPO), serta zebra cross yang ideal. Termasuk, KTL harus memiliki halte atau lokasi ideal pemberhentian angkutan umum.

"Ketika sebuah ruas jalan sudah bisa memenuhi beberapa persyaratan itu, berarti sudah bisa ditetapkan sebagai KTL. Jika belum, kawasan tersebut didorong menuju ke sana," kata pejabat asal Kudus tersebut.

Jalur yang telah ditetapkan sebagai KTL bakal mendapatkan perhatian lebih dari Badan Pembina Transportasi Daerah (BPTD) yang terdiri atas beberapa unsur. Di antaranya, Dishub, Satpol PP, polisi, dan beberapa instansi terkait. "Kami bersama aparat kepolisian akan mengawasi kawasan itu secara intens. Tidak hanya bagi pelanggar lalu lintas, tapi juga yang membuat jalur itu semrawut," ungkapnya.

Sebelumnya, Dishub dan kepolisian melakukan sosialisasi ke beberapa kawasan KTL yang sering digunakan sebagai lahan parkir liar atau tempat ngetem angkutan umum. "Kami sudah mengimbau agar mereka segera pindah. Jika tetap nekat, akan kami tertibkan," tegasnya.

Pemkot juga terus menertibkan PKL di kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTL. Mereka juga membangun pos penjagaan untuk mengantisipasi kembalinya para PKL tersebut. "Jika ditemukan ada yang melanggar, tentu akan ditertibkan serta ditindak," ujar Kabaghumas dan Protokoler Pemkot Hari Tjahyono.

Pemkot melalui Dinas Koperasi juga terus mencari cara agar para eks PKL di kawasan KTL itu tetap bisa berdagang. Salah satu yang sudah berjalan adalah pembuatan sentra PKL binaan. Beberapa di antaranya sudah dioperasikan. Misalnya, di sekitar Taman Bungkul dan Jl Urip Sumoharjo. (ris/ode)

[<<: Kembali](#)

Best View : 1024 x 768 with IE 5.5 or above

© Copyright 2006, Jawa Pos dotcom colo'RADNET.